

ABSTRAK

Sartika Darman, 0910842017, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Evaluasi Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang). Pembimbing Skripsi ini adalah Rozidateno P. Hanida, S.IP M.PA dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si.

Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu daerah otonom yang tanggap dalam merespon tujuan dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu dengan ditetapkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Perda tersebut bertujuan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan rasional. Dispernakbunhut adalah satu dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami restrukturisasi, dengan perubahan penambahan bidang serta penggabungan dua bidang yang dulunya terpisah dalam struktur organisasinya. Teori yang digunakan dalam evaluasi implementasi kebijakan restrukturisasi ini adalah Teori Implementasi kebijakan menurut Merile S. Grindle yang melihat dari indikator isi dan lingkungan kebijakan.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap informan yaitu DPRD, Bagian Administrasi Setda, Bagian Organisasi, DPKA, BKD, Kepala Dispernakbunhut dan Penyuluh Dispernakbunhut serta Kelompok Tani binaan Dispernakbunhut Kota Padang dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menjamin kebenaran informasi, penulis melakukan triangulasi data kepada implementor kebijakan yaitu Kabid-Kabid dan mantan kepala Dispernakbunhut Kota Padang periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan Dispernakbunhut belum efektif dan belum maksimal mencapai tujuan kebijakan. Secara umum, hasil evaluasi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Dispernakbunhut berdampak positif sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat struktur organisasi dan efisiensi anggaran, namun tidak untuk rasionalitas dan kemampuan di tingkat individu yaitu pegawai. Dampak kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah Dispernakbunhut ini memberikan potensi dalam meningkatkan akses pelayanan pada masyarakat. Dan setelah dievaluasi masih terdapat berbagai kendala yaitu dalam hal masih adanya kepentingan-kepentingan yang mendominasi, penempatan pegawai yang belum tepat dan tidak sesuai keahlian, tuntutan bagi penyuluh untuk menguasai berbagai ilmu diluar bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya (*polifalen*) dan masih terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran sehingga disarankan kebijakan ini tidak dilanjutkan dan segera untuk dievaluasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, restrukturisasi, Organisasi Perangkat Daerah

ABSTRACT

Sartika Darman, 0910842017, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Science. Implementation Evaluation of Local Government Organization Restructuring Policy (Case Study at Agricultural Department, Animal Husbandry Department, Farming Department, and Forestry Department in Padang City). Thesis Advisors are Rozidateno P Hanida, S.IP, M.PA and Roza Liesmana, S.IP, M.Si.

Padang City Government is an autonomous city that responsive in responding some objectives from Government Regulation No 41 Year 2007 about Local Government Structural Organization, which determined by Local Regulation No 14 Year 2012 about Changes of Padang Local Regulation No 16 Year 2008 about Establishing Organization and Working Procedure of Local Department. This Local Regulation intend to reduce the overlapping of primary duty from each Local Government Structural Organization functions and achieving organization goals effectively, efficiently, and rationally. Local Government Structural Organizations that restructured with change in addition and also combination from two sectors those previously separated to become in its structural organization. Theory used in evaluation of restructurization policy implementation is Policy Implementation Theory by Merile S Grindle that seen from content indicators and policy environment.

This thesis uses qualitative approach in collecting data through interview with informants, those are Local House of Representative (DPRD), Administration Department of Local Secretary, Organization Department, BKD, DPKA, Head of Agricultural, Animal Husbandry, Farming and Forestry Department (Dispernakbunhut), Dispernakbunhut counselor, Farmer groups assisted by Dispernakbunhut Padang and other documentations related with this study. To ensure these informations are correct, author doing triangulation of datas to policy Implementor, they are heads of sub-department and former head of Dispernakbunhut Department from previous period.

Result from this research can be concluded that implementation from Dispernakbunhut still not effective and maximal to achieve policy objectives. Generally, the result from Implementation Evaluation of Local Government Organization Restructuring Policy at Dispernakbunhut has positive impact and very helpful to the government activity in the level of organizational structure and budget efficiency, but not for rationality and individual ability of the staffs. Impact from restructuring policy of Local Government Structural Organization at Dipernakbunhut is provide potential to improve access to service the society eventhough directly this department is not Local Government Organization which given service to the society. After evaluation, still has some constraints there are domination of interest, uneffective staffs placement and not appropriate with their expertise, the demands for counselor to be expert in other knowledges which is not appropriate with their expertises or educational background (*pilofalen*) and limited human resources and budget, so this policy advised not to be continued and must evaluated soon.

Keywords : Implementation, Evaluation, Restructurization, Local Government Structural Organization